

E-government: Agenda dan Inisiatif

Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis

- National Single Window
- e-Tax
- e-Education

Meningkatkan Proses Bisnis dalam Pemerintahan

- e-Human Resources
- e-Budget
- e-Procurement
- e-Audit

Memastikan Stabilitas dan Keandalan Data Nasional yang Penting

- Database NIN
- Database Informasi Tanah
- Database GIS

Membangun Infrastruktur Nasional sebagai basis e-Government

- Keamanan Informasi
- Government Data Management Center
- Government Secured Intranet

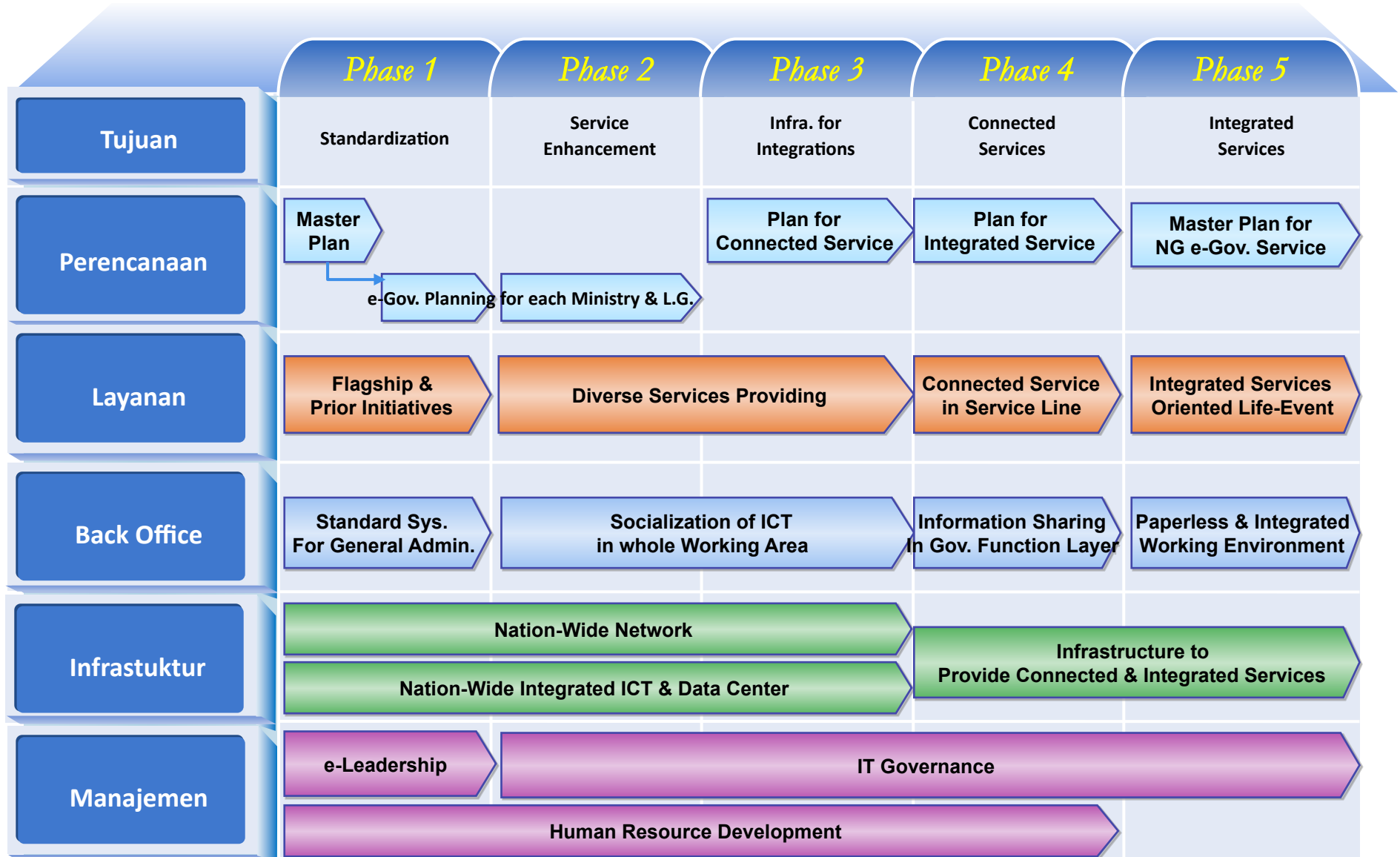
Sosialisasi TIK

- UU ITE
- Change Management
- Kebijakan e-Gov

Pembangunan dan Konstruksi Tata Kelola TIK

- e-Leadership yang kuat
- Perkembangan SDM TIK
- GCIO

E-government: *strategi implementasi*

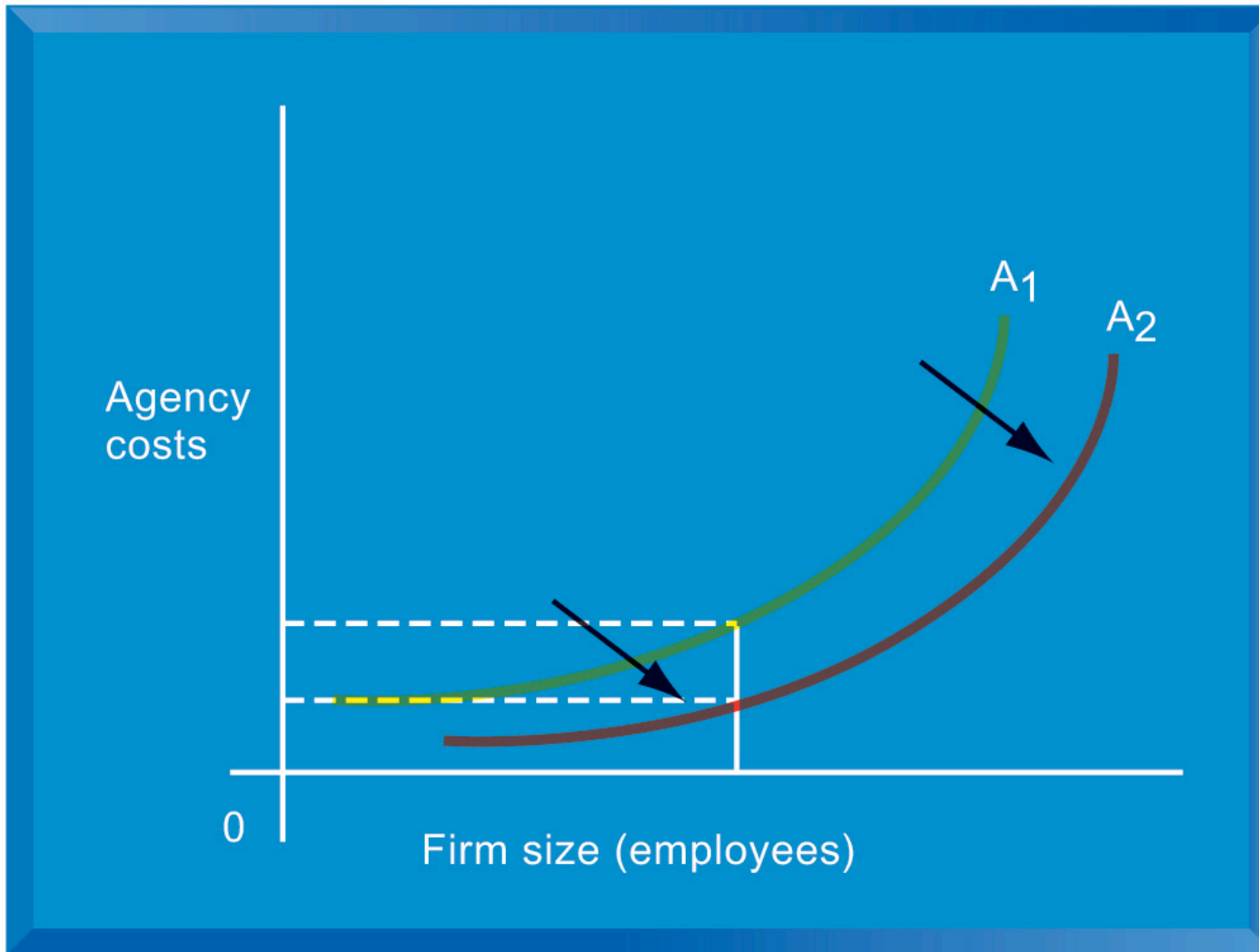


Indikator implementasi e-gov

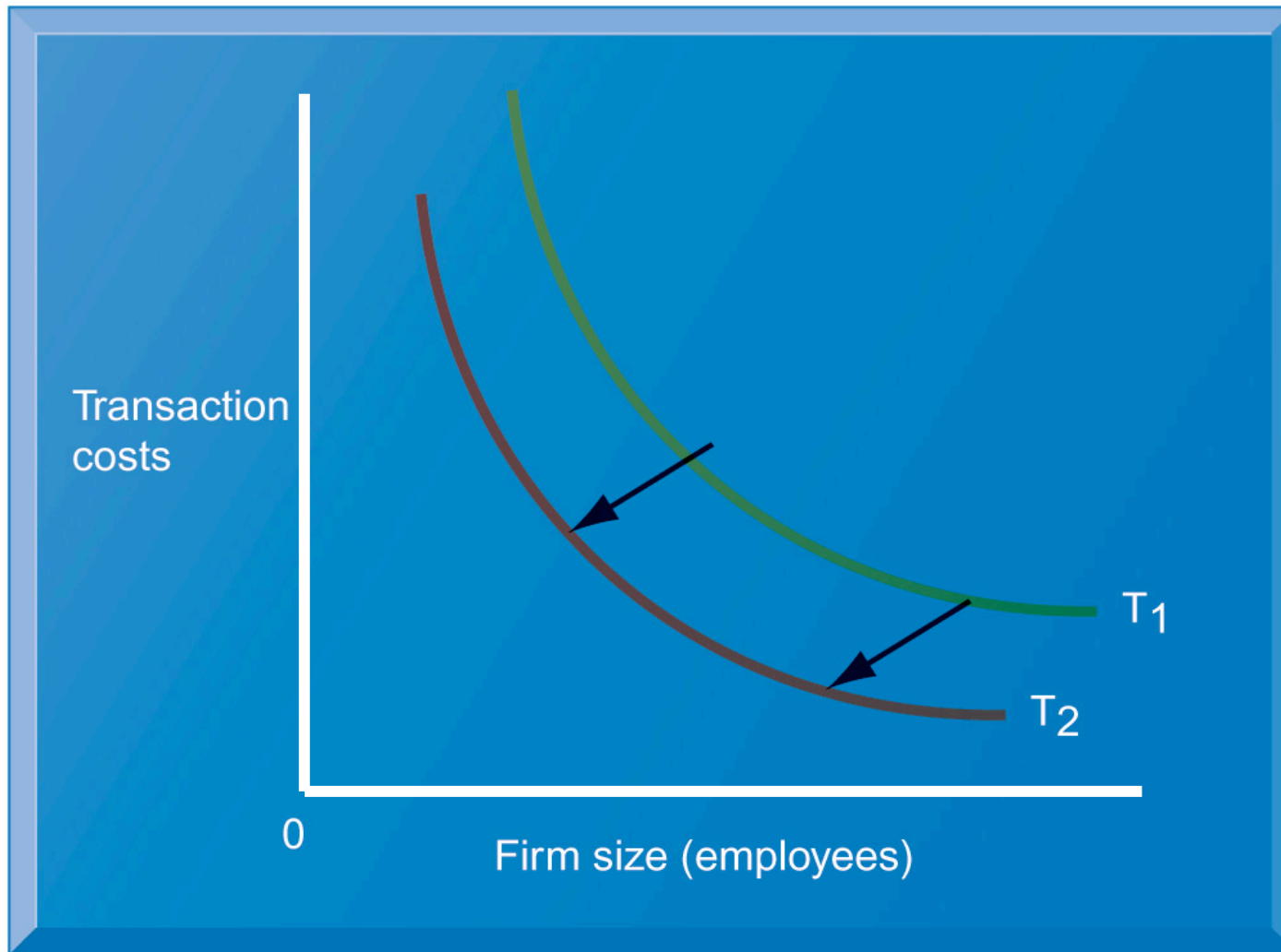
- Hasil Pemeringkatan

PROPINSI	RATA-RATA DIMENSI	PERINGKAT
DIY	2.90	1
JATIM	2.84	2
JATENG	2.83	3
BANTEN	2.31	4
ACEH	2.27	5
KALBAR	2.11	6
SUMSEL	1.93	7
NTT	1.84	8
SULTRA	1.59	9
LAMPUNG	1.28	10

TIK dan Biaya Agensi

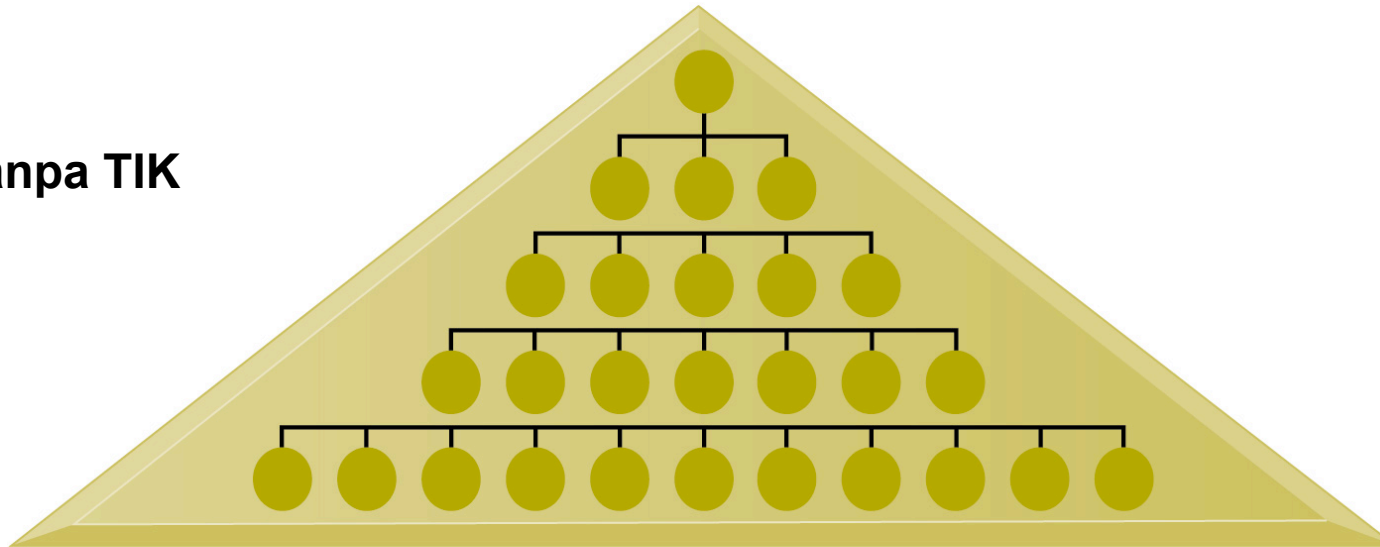


TIK dan Biaya Transaksi



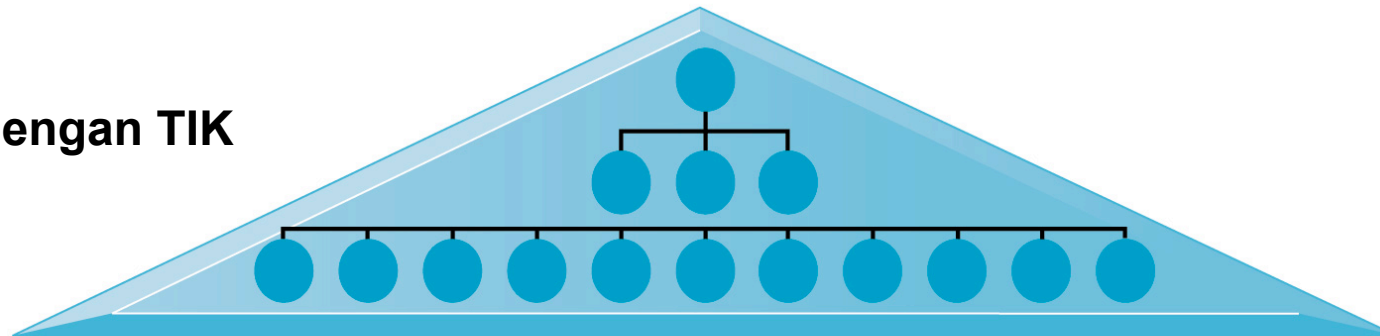
TIK dan Hierarki Organisasi

Tanpa TIK



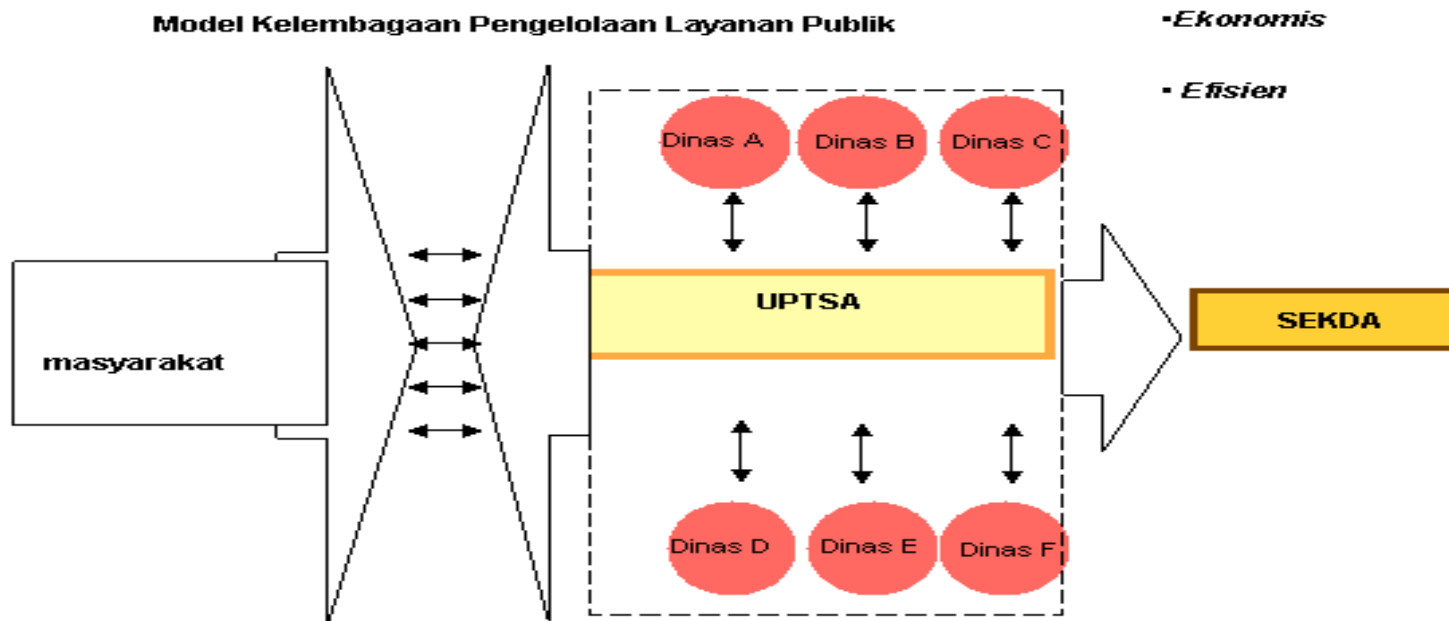
A traditional hierarchical organization with many levels of management

Dengan TIK



An organization that has been "flattened" by removing layers of management

Model Kelembagaan Pengelolaan Layanan Publik (Permendagri No.24 tahun 2006)



Sumber: Hasil Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik TA 2 004

Contoh Pemetaan Pelayanan di Sektor Perijinan

		Kontribusi Tinggi	Kontribusi Rendah
Jumlah Pemo-hon	Besar	Kuadran I <ul style="list-style-type: none"> ▪IMBB ▪Izin Gangguan (HO) ▪Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ▪Akta Kelahiran ▪Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ▪Izin Pembuatan Jalan Masuk (In Gang) ▪Legalisasi Akta-Akta Capil 	Kuadran II <ul style="list-style-type: none"> ▪Izin Penyambungan Saluran Air Hujan ▪Akta Kematian ▪Penerbitan Surat Keterangan Capil ▪Penerbitan Duplikat/Salinan Akta Capil ▪Izin Penelitian Bappeda
	Kecil	Kuadran III <ul style="list-style-type: none"> ▪Akta Perkawinan ▪Tanda Daftar Industri (TDI) ▪Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) ▪Ijin Trayek ▪Ijin Usaha Angkutan 	Kuadran IV <ul style="list-style-type: none"> ▪Izin Sewa Alat Besar Milik Pemkot ▪Pencatatan Pengakuan & Pengesahan Anak ▪Izin Peruntukan Lahan (IPL) ▪Akta Perceraian ▪Pencatatan Pengangkatan Anak ▪Izin Penyambungan Air Kotor ▪Izin Penelitian Bappeda ▪Izin Penelitian Kesbanglinmas ▪Pencatatan Ganti Nama ▪Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ▪Legalisasi Alih Bahasa

UPPSA Kulonprogo



Konter layanan UPTSA Sleman



Tata-ruang Dinas Perijinan Kota Jogja



CHANGE MANAGEMENT

Teknologi informasi hanya merupakan salah satu perubahan yang harus dilakukan.
Apa lagi unsur lainnya?



Pembangunan institusi melalui komunikasi,
pendidikan dan pelatihan, partisipasi dan komitmen.

Tantangan

- Keengganan membuat inisiatif dan ambil risiko
- Kriminalisasi birokrasi
- Budaya menunggu petunjuk
- Aturan perundangan yang kaku dan kompleks
- Payung hukum yang tidak/belum jelas
- Prioritas TIK yang rendah
- Pemahaman terhadap berbagai aspek TIK yang rendah.